



## **STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI PEMBINGKAIAN INFORMASI ISU PAPUA TAHUN 2021**

**Muhammad Sutomo, Ahmad G. Dohamid, Fauzia Gustarina Cempaka Timur**

Prodi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan,

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

### **Abstrak**

Teknologi internet telah menjadikan media sosial sebagai sarana penyebaran isu hoaks tertinggi dengan konten permasalahan sosial dan politik. Perkembangan teknologi internet telah memberi kemudahan bagi kelompok kriminal bersenjata Papua dan pendukungnya dalam melakukan pembungkaman isu Papua dan menyebarkannya melalui media daring dan media sosial guna mendiskreditkan pemerintah Indonesia. Sepanjang tahun 2021 ditemukan maraknya penyebaran isu Papua di ruang siber dengan puncaknya menjelang tanggal 1 Desember. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah dalam menghadapi pembungkaman informasi isu Papua di media sosial dan media daring. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif yang berfokus pada analisis strategi pemerintah dengan subfokus pembungkaman isu Papua di media sosial twitter. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang dilakukan pemerintah belum mampu untuk menghadapi penyebaran pembungkaman isu Papua.

**Kata Kunci:** Media, Non Militer, Pembungkaman, Papua, Strategi.

## PENDAHULUAN

Masyarakat Telematika Indonesia pada tahun 2020 mengeluarkan hasil survey wabah hoax nasional Tahun 2019 yang menghasilkan data bahwa saluran penyebaran yang tertinggi adalah media sosial dengan isu hoaks tertinggi pada permasalahan sosial dan politik (Mastel, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi alat propaganda untuk menggiring opini masyarakat sehingga dapat mengancam kepentingan nasional bila tidak dilakukan antisipasi. Water Lippmann mengatakan bahwa opini publik seharusnya menjadi penggerak utama dalam demokrasi dan opini publik dapat dibentuk oleh penyelenggara opini secara terorganisir (Lippman, 2011).

Berita di media massa maupun media sosial yang kontinu akan menyebabkan masyarakat percaya bahwa berita tersebut adalah informasi yang benar dan dapat menjadi rujukan informasi. Framing (Pembingkai) merupakan hal tak terhindarkan dalam komunikasi, kita semua membawa bingkai kita sendiri ke dalam komunikasi kita di masyarakat (Wadжди, 2018).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berupa internet telah membawa perubahan besar terhadap kehidupan manusia antara lain dalam melakukan komunikasi dan penyebaran informasi. "The Internet has revolutionized the computer and communications world like nothing before" (Barry, 2007). Dengan kemampuan penyebaran informasi tersebut, internet berfungsi ganda sebagai alat interaksi dan penyebaran pengetahuan dan sarana menyebarkan berita palsu ataupun propaganda yang dapat menimbulkan gejolak sosial dan mengancam keamanan dan kedaulatan negara.

Papua yang tergabung dengan Indonesia sejak 1969 masih diramaikan dengan isu-isu negatif yang disebarkan oleh kelompok-kelompok yang ingin

memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isu yang dikembangkan adalah pemberitaan negatif berupa pelanggaran HAM dan mengabaikan pembangunan serta perkembangan SDM di Papua, padahal faktanya bahwa pemerintah memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM di Papua. Kalaupun masih terbatas, hal tersebut dikarenakan membangun infrastruktur dan SDM di Papua dan Papua Barat bukanlah persoalan mudah. Banyak hal yang menjadi penghambat dalam percepatan pembangunan Papua, seperti kondisi geografis wilayah yang berbukit dan pegunungan, kondisi cuaca dan kualitas masyarakat yang masih rendah. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya konflik antar suku dan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Teroris Papua serta berita negatif yang disebarkan oleh sayap politiknya

Pada Tahun 2021, paska tertembaknya Kabinda Papua (Yahya, 2021), pemerintah meningkatkan tindakan tegas terhadap aksi terorisme yang dilakukan oleh KKB berupa penangkapan dan penyerangan sehingga bentrokan antara TNI-Polri dan KKB kerap terjadi. Bentrokan yang terjadi dengan cepat tersebar ke ruang siber melalui sarana media sosial ataupun media daring dengan pembingkai seolah-olah terjadi serangan brutal TNI-Polri kepada masyarakat Papua.

Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk menunjukkan kemampuannya dalam pengelolaan informasi di ruang siber guna mencegah tersebarnya propaganda negatif yang dapat mengganggu pertahanan dan stabilitas nasional. Kemampuan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk memberi dukungan bagi pertahanan nirmiliter. Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2021 tentang

Kebijakan Umum Pertahanan Negara, dimana pembungkahan informasi negatif terhadap isu Papua merupakan ancaman nonmiliter berdimensi teknologi karena propaganda yang disebarakan dapat mengganggu keutuhan dan kedaulatan bangsa. Latar belakang di atas menginspirasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: “Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Pembungkahan Informasi Isu Papua Tahun 2021”. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan dengan fokus strategi pemerintah dan sub fokus pembungkahan isu Papua di media sosial pada tahun 2021. Penelitian tersebut sangat diperlukan guna membangun strategi yang tepat dalam menghadapi perang informasi di Papua yang menjadi ancaman non militer terhadap kedaulatan Negara Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu perang informasi yang menjadi objek penelitian serta bagi pengambil kebijakan terkait penyelesaian konflik Papua.

### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus pembungkahan informasi isu Papua yang terjadi pada tahun 2021. Peneliti melakukan wawancara terhadap nara sumber di Kementerian Pertahanan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk kemudian dilakukan observasi secara langsung melalui sistem big data media analitik.

Peneliti menggunakan sistem big data media analitik untuk mendapatkan data isu Papua di media sosial twitter dengan menggunakan kata kunci Papua selama periode tahun 2021. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data dengan cara observasi ulang, wawancara lebih mendalam, dan diulang-ulang

sampai jenuh disertai studi pustaka dari sumber-sumber yang valid.

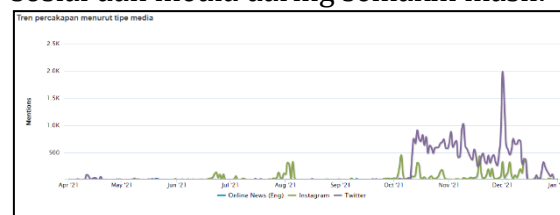
Analisis data dilakukan dengan melakukan pengkodean terhadap hasil penelitian yang didapatkan yaitu pengkodean terbuka (*open coding*), pengkodean axial (*axial coding*) dan pengkodean selektif (*selective coding*).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pembungkahan Informasi Isu Papua

Pembungkahan informasi isu Papua dilakukan oleh kelompok pendukung pembebasan Papua dengan tujuan propaganda dan mempengaruhi persepsi masyarakat dan dunia internasional termasuk dalam bentuk perang psikologi. Perang psikologis dilakukan dengan menargetkan pimpinan, populasi, kekuatan lawan dan kebudayaan (Martin, 2007).

Berdasarkan data hasil penelitian yang didapatkan dari informan diketahui bahwa perkembangan teknologi informasi khususnya internet semakin memudahkan penyebaran informasi hoaks yang dapat mengancam disintegrasi bangsa di Papua. Melalui sistem Big Data Media Analytic Kemhan didapatkan bahwa peningkatan percakapan dengan kata kunci “Papua” meningkat cukup tinggi pada periode bulan November dan Desember 2021. Hal ini dikarenakan tanggal 1 Desember dianggap sebagai Hari Kemerdekaan Papua oleh kelompok pendukung pembebasan Papua sehingga narasi negatif dan kampanye pengibaran bendera Bintang Kejora melalui media sosial dan media daring semakin masif.



Gambar 1. Grafik Twitter  
Sumber : Big Data Media Analytic, 2021

Sebagai contoh adalah salah satu cuitan yang disebarakan melalui ruang siber pada tanggal 6 Desember 2021 yaitu penembakan melalui helikopter dan pembakaran desa masyarakat sipil oleh aparat Indonesia. Informasi tersebut memberikan nilai terkandung bahwa terjadi tindakan brutal yang dilakukan militer Indonesia kepada masyarakat sipil Papua. Faktanya adalah penembakan tersebut dilakukan dalam rangka melindungi helikopter dari tembakan KKB dari arah bawah dimana helikopter tersebut sedang mengevakuasi anggota TNI yang tertembak. Sedangkan pembakaran yang terjadi dilakukan oleh KKB terhadap fasilitas umum.

*“Just another day in West Papua-with an Indonesian helicopter gunship machine gunning a civilian village from the air, troops on ground burning houses. Indonesia invaded #WestPapua with guns-60 years on they’re stillruling with guns, Asia Pacific Report @ABVnews”* (Cronau, 2021)

Pengguna twitter berbahasa Inggris merupakan pengguna yang aktif menyuarakan dukungan terhadap keinginan gerakan Papua merdeka untuk memisahkan diri dari NKRI. Kecaman terhadap tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat TNI-Polri juga dilakukan hingga munculnya persepsi telah terjadi pelanggaran kemanusiaan di Papua. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pengguna twitter berbahasa Indonesia yang pada umumnya mengecam kegiatan KKB Papua dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah.

**Tabel 1. Dimensi Pembungkahan Media**

Bahasa	Visibilitas	Audience Saliance	Valensi
Indonesia	840.486	Nasional	Positif Pro NKRI
Inggris	51.044	Global	Negatif Pro Papua

Sumber: Big Data Media Analitik, 2021

Penyebaran informasi yang tidak benar hoaks dan menafsirkan bahwa TNI-Polri telah melakukan tindakan kekerasan kepada masyarakat sipil Papua telah mengakibatkan persepsi yang tidak benar dari masyarakat internasional. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya komentar dari beberapa akun yang berasal dari luar negeri yang cenderung mengecam tindakan aparat serta mendukung pemisahan Papua dari NKRI. Salah satu cuitan yang mendapat pembicaraan tertinggi pada tahun 2021 adalah cuitan yang berasal dari Bonnibel dengan retweets mencapai 178 kali yang menyebutkan adanya ketidakadilan dan kekejaman yang sedang terjadi di Papua Barat.

*“Colonialist state violence doesn’t always come with guns ablazing. Unreported brutality and unjust criminalization require feel-good media products like this one as an ideological support for the ongoing cruelty in West Papua”* (Bonnibel, 2021)

Pembungkahan informasi tersebut dilakukan hampir pada setiap peristiwa yang terjadi, salah satu informan menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi dibesar-besarkan melalui informasi yang tersebar sehingga kejadian di pelosok diperangapkan situasi Papua tidak aman secara keseluruhan. Peneliti memandang bahwa pembungkahan informasi Papua sudah pada status yang mengkhawatirkan dimana informasi yang disebarakan sangat merugikan pemerintah Indonesia. Netizen masyarakat global diarahkan untuk berempati terhadap penderitaan masyarakat Papua dan menyalahkan tindakan TNI-Polri dan pemerintah Indonesia. Pemerintah harus segera melakukan langkah yang cepat dan terpadu guna mengeliminir munculnya isu negatif Papua.

Pembungkahan informasi isu Papua telah memberikan informasi yang

salah kepada masyarakat internasional dan hal ini tentu saja merusak nama baik Indonesia. Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman Webur pada sidang PBB tanggal 25 September 2021, menuduh adanya pelanggaran HAM di Papua dan meminta Indonesia agar mengizinkan Komisioner HAM PBB untuk datang ke Papua (Sihite, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan Papua masih mendapat perhatian dunia internasional dan tidak hanya menjadi pembicaraan di dalam negeri.

Kepentingan Vanuatu di Papua secara antropologis didasari oleh hubungan etnis yang cukup erat, yaitu Melanesian Connection. Kedekatan etnis inilah yang menjadi salah satu sumber penyebab masifnya dukungan Vanuatu terhadap upaya kemerdekaan Papua (Ahmad, 2018). Dengan dukungannya tersebut, Vanuatu memfasilitasi berdirinya kantor ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) dan penggalangan dukungan dari negara-negara pasifik lainnya.

Keamanan, diskriminasi, hak asasi manusia merupakan tema yang sering kali diangkat dalam framing isu Papua. Peristiwa di Papua terutama yang melibatkan aparat TNI Polri selalu dilakukan *framing* bahwa telah terjadi tindakan kekerasan kepada masyarakat sipil dan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Tentunya semua framing yang dilakukan merupakan bagian dari agenda setting yang diarahkan kepada dukungan kemerdekaan Papua.

Penyebaran isu Papua pada media sosial dan media daring merupakan ancaman terhadap stabilitas keamanan di Papua yang dapat memicu dan mendorong terjadinya kekacauan dan disintegrasi bangsa.

### **Strategi Pemerintah**

Permasalahan Papua dengan terus terjadinya upaya disintegrasi Papua tidak hanya dilihat pada gerakan perlawanan namun perlu dicermati akar

permasalahannya. Sri Yanuarti dalam penelitiannya tentang kemiskinan dan konflik Papua menulis bahwa kekayaan sumber daya alam (SDA) Papua belum menjadi berkah bagi warganya. Ekstraksi SDA yang dilakukan akan menjadi pemicu konflik selama pembagian dari eksploitasi kekayaan alam tersebut didapat dibagi secara adil dan jelas serta melibatkan masyarakat setempat (Sri, 2012). Hal serupa disampaikan pula oleh Bhakti dan Pigay dalam penelitiannya yang menulis bahwa persoalan Papua dari sisi sosial ekonomi dan budaya bertumpu pada tiga hal pokok yaitu pendidikan, kesehatan dan sektor ekonomi rakyat. Dari tiga aspek tersebut tampak jelas bahwa Indeks Pembangunan Manusia Papua dan Papua Barat memiliki nilai terendah di Indonesia yaitu menduduki nomor 32 untuk Provinsi Papua dan nomor 33 untuk Papua Barat (Bhakti, 2016).

Strategi yang dilakukan oleh beberapa unsur pemerintah dalam mencegah terjadinya disintegrasi bangsa yang disebabkan oleh penyebaran informasi hoaks serta informasi negatif lainnya di Papua menggunakan strategi yang sama yaitu melakukan counter opini, pemutusan akses dan melakukan pendekatan kesejahteraan dan pendidikan kepada masyarakat Papua.

Strategi monitoring, analisis isu, pembuatan narasi dan kontra opini serta pemutusan akses belum mendapatkan hasil yang maksimal dalam menghadapi pembungkahan isu Papua di ruang siber. Hal ini tampak terlihat pada hasil monitoring melalui Big Data Media Analisis dimana pembungkahan isu Papua terus terjadi dan melibatkan akun dari luar Indonesia. Ketidakberhasilan tersebut jug dapat ditunjukkan dengan masih maraknya dukungan dari warga asing di luar negeri terhadap pengibaran bendera Bintang Kejora.

Strategi pemutusan akses internet yang dilakukan pemerintah pada tahun 2019 belum dapat mengatasi

penyebaran isu negatif Papua. Keputusan akses internet tersebut belum memiliki kekuatan hukum dan melanggar HAM karena merampas kebebasan orang untuk berkomunikasi (Siti, 2019). Lebih lanjut Siti menulis bahwa pemerintah seharusnya melakukan pembatasan 'konten' atau 'muatan' yang dinilai melanggar karena pembatasan internet tidak dapat menghilangkan penyebaran informasi negatif.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg) disebutkan bahwa dalam rangka menghadapi ancaman nonmiliter dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dalam menangani ancaman berdimensi teknologi berupa penyebaran propaganda dan berita palsu yang mengancam kedaulatan bangsa, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) ditunjuk sebagai unsur utama dibantu dengan unsur pendukung lainnya (Perpres, 2021). Namun pada kenyataannya, Jakumhaneg belum tersosialisasikan kepada Kemkominfo sehingga belum dikeluarkannya Peraturan Menteri sebagai penjabaran Jakumhaneg tersebut.

Pemerintah juga menerapkan strategi diplomasi luar negeri guna menghadapi tuntutan dari Vanuatu dan negara lainnya yang ingin mengangkat isu Papua ke dalam sidang internasional. Para Diplomat Indonesia secara tegas membela kepentingan Indonesia dan menyampaikan bahwa informasi yang disampaikan Vanuatu tidak benar dan dipelintir. Ditekankan pula tujuan dan prinsip piagam PBB serta deklarasi prinsip hukum internasional tentang hubungan persahabatan dan kerjasama antar negara. Peristiwa tersebut terjadi pada sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat tanggal 26 September 2021. Pada sidang tersebut, Perdana

Menteri Vanuatu, Bob Loughman meminta Komisi HAM PBB mengecek dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dengan hadir secara langsung ke Provinsi Papua (Sihite, 2021).

**Tabel 2. Strategi Pemerintah**

Badan	Tujuan (Ends)	Cara (Ways)	Sarana (Means)
Kemhan	Menegakkan Kedaulatan dan keselamatan Bangsa	Jakstrahan, monitoring ruang siber, kontra opini	Bigdata analitik, media sosial dan media daring
Kominfo	Mencegah pelanggaran terhadap UU ITE	Monitoring ruang siber, kontra opini, literasi masyarakat, pemutusan akses internet	Sistem monitor ruang siber, media sosial, media daring, radio, televisi

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Untuk meningkatkan pertahanan nirmiliter berdimensi teknologi berupa propaganda dan hoaks yang mengancam disinte grasi bangsa maka perlu ditentukan ends, means dan ways guna membangun strategi yang kokoh.

a. Ends (Tujuan)

Pertahanan nirmiliter merupakan bagian dari pertahanan negara secara utuh seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan demikian pertahanan nirmiliter dimensi teknologi yang dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan teknologi informasi melalui berbagai media

internet berupa propaganda, intimidasi menyesatkan yang dapat mendorong gerakan sosial yang mengancam kedaulatan negara (Jakumhaneg 2021).

Kemhan dan Kemkominfo melakukan kontra narasi dan penyebaran narasi positif guna meluruskan informasi negatif dan hoaks di Papua yang dapat mempengaruhi masyarakat Papua dan masyarakat internasional. Narasi dan literasi yang dilakukan kepada masyarakat Papua dimaksudkan agar tidak mudah terpengaruh dan mengikuti ajakan kegiatan Papua merdeka serta dapat menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Kontra opini juga ditujukan agar masyarakat internasional tidak mendukung kegiatan yang dilakukan oleh gerakan Papua merdeka serta meyakini bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI dan menjadi urusan dalam negeri Indonesia

#### b. Means (Sarana)

Dalam pencapaian tujuan tersebut diperlukan penerahan sarana dan sumber daya berupa tata kelola, sumber daya manusia (SDM), perangkat teknologi dan anggaran. Ketersediaan sarana yang mumpuni akan meningkatkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan.

Tata kelola berupa kebijakan, peraturan ataupun perundang-undangan diperlukan guna melandasi tugas-tugas yang dilaksanakan sehingga tercapai koordinasi yang baik diantara unsur yang terlibat. Dalam menghadapi ancaman nirmiliter tersebut, Presiden telah menerbitkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara pada tahun 2021 yang berlaku selama masa jabatannya. Kebijakan tersebut melingkupi pembangunan, pembinaan, penggunaan, regulasi, anggaran, pengawasan dan pengendalian serta penyelenggaraan pertahanan nirmiliter. Namun kebijakan tersebut belum tersosialisasi kepada

Kementerian/Lembaga yang terlibat. Kementerian Pertahanan sebagai inisiator Jakumhaneg perlu melakukan sosialisasi kepada K/L terkait sehingga pelaksanaan pertahanan nirmiliter dapat terkoordinasi dengan baik.

Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan komunikasi melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sesuai undang-undang tersebut, Kemkominfo melakukan pemblokiran, pemutusan akses, kontra opini dan literasi kepada masyarakat sehingga dapat mencerdaskan masyarakat dalam berperilaku di media sosial.

Sumber daya manusia merupakan unsur yang vital dimana SDM yang berkualitas akan menentukan kualitas dari kegiatan yang dilaksanakan. SDM berkemampuan analisa dan menguasai teknologi informasi diperlukan sehingga dapat melakukan analisis terhadap isu yang beredar serta menyiapkan bentuk dan narasi kontra opini yang dibutuhkan dengan tepat. Dengan demikian perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan kepada SDM yang ditugaskan sebagai tim monitoring, analisis dan pembuatan narasi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi serta pengetahuan tentang sejarah dan budaya Papua.

Sistem informasi dan perangkat TIK merupakan senjata yang digunakan dalam perang informasi di ruang siber. Oleh karena itu peralatan yang digunakan harus dapat mengikuti perkembangan dan trend teknologi informasi. Penggunaan Big Data Media Analitic Kemhan perlu dipelihara dan ditingkatkan sehingga menghasilkan data lebih lengkap dan memenuhi kebutuhan analisa. Ditjen Aptika Kemkominfo mempersiapkan sistem

monitoring dan analisis yang dapat digunakan berbagi pakai oleh K/L lain yang membutuhkan, hal ini merupakan peluang bagi K/L untuk memperoleh isu sesuai tugas dan fungsinya sehingga dapat menyiapkan perencanaan strategis. Peningkatan kemampuan teknologi yang digunakan sangat diperlukan agar dapat meningkatkan upaya kontra opini dan pemblokiran terhadap akun provokatif.

Ketersediaan anggaran yang mencukupi merupakan pendukung terlaksananya operasional dan pembangunan sistem serta sumber daya yang kuat. Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan teknologi informasi seiring perkembangan teknologi memerlukan dukungan anggaran secara rutin agar dapat beroperasi maksimal. Kegiatan kontra opini dan pembangunan narasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat Papua dipengaruhi ketersediaan anggaran dalam pelaksanaannya.

### c. Ways (Cara)

Sesuai tugas dan tanggung jawabnya seperti tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2002, Menteri Pertahanan membantu presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara. Pencapaian tujuan pertahanan militer dalam menghadapi pembungkaman isu Papua diterjemahkan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusdatin Kemhan dan Biro Humas Kemhan berupa monitoring isu Papua dan analisis serta pembuatan narasi serta pembangunan opini publik.

Dari penelitian yang dilaksanakan, Pusdatin Kemhan melakukan pembangunan sistem Big Data Media Analytic guna mengumpulkan informasi isu Papua dan membuat laporan analisis untuk dilaporkan kepada Pimpinan Kemhan. Penggunaan teknologi tersebut sangat penting untuk mengetahui pembicaraan dengan topik Papua secara realtime. Tim monitoring

dipersiapkan untuk bekerja selama 24 jam memantau perkembangan informasi yang terjadi. Demikian pula Biro Humas Setjen Kemhan, menyiapkan tim untuk menyiapkan narasi kontra opini dan memproduksi memes, flyer, audio dan visual dalam pembangunan opini masyarakat terhadap isu Papua dan isu pertahanan yang muncul. Dilakukan pula upaya somasi dan pelaporan terhadap akun dan media yang melakukan penyebaran hoaks dan isu negatif lainnya kepada Kemkominfo dan Dewan Pers untuk dilakukan penghapusan ataupun pemblokiran.

Kementerian Komunikasi dan Informasi sesuai tugas dan fungsinya sesuai UU KIP dan UU ITE melakukan monitoring terhadap informasi yang beredar di ruang siber. Ditjen Aptika melakukan monitoring dan pemblokiran terhadap konten negatif serta memberikan label hoaks terhadap informasi yang tidak benar. Hasil monitoring dari Ditjen Aptika ditindaklanjuti oleh Ditjen IKP untuk dianalisis dan penyiapan kontra opini terhadap isu negatif yang mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Disamping melakukan kontra narasi di ruang siber, Kemkominfo juga melakukan kegiatan secara langsung di wilayah Papua dengan menyelenggarakan diskusi melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat Papua dalam menangkal isu Papua yang berkembang.

Pendekatan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan guna menangkal isu Papua secara langsung dengan hadir ditengah-tengah masyarakat. Kemkominfo juga melakukan literasi bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak sehingga masyarakat tidak turut serta dalam menyebarkan berita hoaks yang dapat meresahkan serta mengganggu kedamaian masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan melibatkan perempuan dan masyarakat dalam



kegiatan kebudayaan di wilayah Papua. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kedepannya dilakukan hingga pelosok Kabupaten dan tidak hanya di kota-kota besar wilayah Papua.

Diplomasi internasional merupakan salah satu strategi pemerintah untuk membina hubungan baik dengan para negara sahabat sehingga tetap mendukung integrasi Papua dalam NKRI dan tidak mudah terpengaruh oleh isu Papua yang tersebar di media sosial dan media darng. Dengan adanya dukungan dari negara sahabat tersebut maka Indonesia dapat lebih mudah untuk mencegah diangkatnya isu Papua dalam sidang-sidang PBB ataupun organisasi internasional lainnya.

## **SIMPULAN**

Papua saat ini masih menjadi perhatian khusus karena masih terdapat kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan melakukan perlawanan bersenjata dan pemingkaian isu Papua guna mendapatkan perhatian dan dukungan masyarakat internasional. Melalui observasi lebih lanjut menggunakan sistem Big Data Media Analitik, didapatkan bahwa tema yang kerap dimunculkan oleh kelompok pendukung kemerdekaan Papua dalam pemingkaian informasi pada isu Papua yaitu keamanan, pelanggaran HAM, diskriminasi, self determination.

Setiap peristiwa yang terjadi di Papua dimanfaatkan oleh kelompok pendukung kemerdekaan berupa pemingkaian informasi negatif. Pemingkaian tersebut mengakibatkan netizen mendapatkan informasi serta mindset yang salah bahwa Papua tidak aman, terjadi diskriminasi dan pelanggaran HAM serta masyarakat Papua tidak mendapatkan kesejahteraan yang laya

Terdapat kesamaan penanganan terhadap pemingkaian informasi isu Papua yaitu: melakukan

monitoring isu Papua melalui media sosial dan media daring, analisis isu yang muncul., menyiapkan narasi kontra opini, penyebaran narasi melalui media sosial, media daring, televisi dan radio. melakukan gugatan hukum, narasi positif agar tidak menimbulkan permasalahan baru, dan mengedepankan pendekatan ke-sejahteraan terhadap masyarakat Papua.

Dalam menghadapi ancaman nonmiliter berupa pemingkaian informasi isu Papua tersebut, diperlukan kesatuan langkah dari setiap aparat pemerintah dari Pusat hingga Daerah sehingga dapat meredam isu propaganda yang beredar. Disamping melakukan pembatasan 'konten' atau 'muatan' informasi yang tersebar di ruang siber, diperlukan strategi lain yang dapat menyelesaikan akar permasalahan di Papua antara lain peningkatan kesejahteraan dan pendidikan sehingga dapat merubah 'mindset' masyarakat Papua untuk tidak mendukung kegiatan KKB dan meningkatkan rasa nasionalisme sebagai Bangsa Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad, S. (2018). Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu Dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua. *Jurnal Hubungan Internasional*, 91-108.

Barry, M. L. (2007). Brief History of Internet. *Internet Society*, 1.

Bhakti. (2016). Menemukan Akar Masalah dan Solusi atas Konflik Papua: Supenkah? *Jurnal Penelitian Politik*, 9(1), 18, 18.

Bonnibel. (2021, Desember 03). *Thread*. Retrieved from twitter.com: [https://twitter.com/Bonnibel\\_R/status/1466754563386449923](https://twitter.com/Bonnibel_R/status/1466754563386449923)

Cronau, P. (2021, Desember 06). *Thread*. Retrieved from twitter.com: <https://twitter.com/PeterCronau/status/1467674741133623299>

Lippman, W. (2011). *Public Opinion*. New York: Harcourt, Brace & Co.

Martin, C. L. (2007). *Conquest in Cyber Space*. New York: Cambridge University.

Mastel, I. (2020). *Hasil Survey Wabah Hoax Nasional 2019*. Jakarta: Mastel.

Perpres. (2021). *Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024*. Jakarta: Mensesneg.

Sihite, E. (2021, September 26). *Berita Dunia*. Retrieved from [www.viva.co.id](http://www.viva.co.id): <https://www.viva.co.id/berita/dunia/1408352-sebut-ri-langgar-ham-papua-di-sidang-pbb-vanuatu-dibungkam-diplomat>

Siti, C. D. (2019). Pembatasan Internet Dalam Menghadapi Konflik di Papua. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol XI*, 17.

Sri, Y. (2012). Kemiskinan dan Konflik Papua di Tengah Sumber Daya yang Melimpah.

Wadjdi, A. F. (2018). Implementation of Framing, Agenda Setting and Data Mining in Evaluation of Public Policies. *International Conference on Informatics and Computational Sciences*, 18.

Yahya, A. N. (2021, April 26). *nasional*. Retrieved from [www.kompas.com](http://www.kompas.com): <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/26/08572891/kronologi-gugurnya-kabinda-papua-i-gusti-putu-danny-dan-antisipasi-bin?page=all>